



Media Title	Bisnis Indonesia	
Date	8 Oktober 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	28	Article Size
Journalist	Fitri Rachmawati	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

► TRUK KELEBIHAN MUATAN

# Pemerintah Harus Bertindak Tegas

JAKARTA—Masyarakat mendesak pemerintah menindak tegas oknum pengusaha angkutan dan pemilik barang yang ketahuan mengoperasikan armada truk barang yang melebihi kapasitas supaya menimbulkan efek jera.

Pengamat Transportasi dari Sustainable Urban Transportation Improvement Project atau (SUTIP) Achmad Izzul Waro mengatakan pemerintah dapat melakukan sejumlah cara seperti membuat regulasi tanggung renteng atau tanggung jawab proposal.

Dengan cara itu, sanksi tidak hanya dikenakan kepada pemilik kendaraan tetapi juga pemilik barang. "Aturan selama ini hanya pemilik kendaraan yang bertanggung jawab atas tindakan muatan berlebih. Dengan demikian, belum ada efek jera terhadap si pemilik barang," tuturnya Selasa (7/10).

Cara lainnya, pemerintah harus segera mengatur ulang batas kapasitas moda angkutan berdasarkan jarak ataupun kapasitas daya angkut.

Idealnya, jarak angkutan barang kurang dari 400 km menggunakan moda truk, sedangkan jarak lebih dari 400 km menggunakan kereta api dan jarak lebih dari 1.200 km menggunakan kapal.

*Ketiga*, penenaan denda terhadap pelaku

muatan berlebih selama ini harus segera diganti dengan penurunan paksa muatan berlebih yang diangkut. Sanksi denda yang berlaku selama ini dinilainya tidak bisa mengurangi angkutan *overload* di jalan tetapi justru menyuburkan aksi pungutan liar.

"Mekanismenya, barang diturunkan paksa dan barang yang diturunkan menjadi tanggung jawab pemilik. Pemerintah tidak usah hiraukan keamanan dan penyimpanan barang tersebut," katanya.

*Keempat*, perlunya penerapan teknologi seperti alat sensor untuk mendeteksi kelebihan beban angkutan barang. Melalui teknologi ini, pemerintah tidak perlu menimbang satu per satu kendaraan yang lewat.

*Kelima*, ujarnya, pembangunan jembatan timbang di kawasan industri bisa dijadikan solusi alternatif. Namun, pembangunan tersebut harus sesuai dengan fungsi jembatan timbang sebagaimana mestinya. "Semakin banyak jumlah jembatan timbang semakin bagus," ujarnya.

Selain itu, keseriusan dan kekonsistenan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dan melakukan pengawasan terhadap angkutan yang melebihi muatan dapat mereduksi masalah truk *overload* ini. (Fitri Rachmawati)